

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah, yang mana tiap kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah mempunyai kebebasan dalam membentuk kebijakan, menata, mengatur, mengelola daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ini untuk dapat memajukan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, membangun efisiensi dan efektifitas dalam menata sumber daya daerah serta menciptakan dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah. Tujuan otonomi daerah yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (3) otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah pusat tetap memantau setiap daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing kepala daerah harus menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPDD) kepada pemerintah pusat, yang mana dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut memuat tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dan untuk menghindari adanya asumsi oleh masyarakat, laporan penyelenggaraan daerah ini juga harus diinformasikan secara transparan dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam menilai dan mengevaluasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dilakukan dengan menganalisis data yaitu berdasarkan karakteristik yang memuat capaian dan keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dalam bentuk capaian yang diperoleh pemerintah daerah. Dalam menilai kinerja tersebut, dilakukan penilaian terhadap karakteristik pemerintah daerah yang memuat beberapa indikator yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan belanja modal. Indikator-indikator tersebut menjadi evaluasi dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah karena adanya hubungan tiap-tiap indikator dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kepada pemerintah pusat.

Keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang dapat dinilai dari beberapa indikator karakteristik pemerintah daerah tersebut digambarkan dengan, yang pertama ukuran daerah yang mana daerah yang besar akan memiliki aset yang besar pula sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, tingkat kekayaan daerah menjadi tanggung jawab tiap-tiap kepala daerah dalam menggali potensi daerahnya yang dapat menjadi pendapatan asli daerah dalam membiayai keperluan daerahnya sehingga dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tanpa bergantung pada pusat, tingkat ketergantungan pada pusat dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah yang mana menunjukkan semakin kecil

ketergantungan daerah pada pusat semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya belanja modal yang merupakan realisasi belanja untuk keperluan aset pemerintah daerah yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang digambarkan dengan seberapa besar belanja yang direalisasikan untuk belanja modal, dan temuan audit BPK dimana setiap laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan pemeriksaan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan(fraud), dalam menilai laporan tersebut Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan penilaian dalam bentuk opini audit. Semakin rendah angka temuan audit semakin baik kinerja suatu pemerintah daerah.

Oleh karena itu dalam mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah otonom diperlukannya laporan kinerja pemerintah yang menjadi tanggungjawab setiap pemerintah daerah untuk diserahkan dan diinformasikan kepada pemerintah pusat atas dasar penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang dinilai dan dievaluasi untuk dapat dinilai sejauh mana capaian dan keberhasilan kinerja suatu pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa adakah pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit atas kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dengan judul penelitian “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2019”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
5. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bahwa adanya keterkaitan antara karakteristik pemerintah daerah dari indikator antara lain: ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan akan suatu fenomena yang terjadi disetiap pemerintah daerah yang mana dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh atau tidaknya keterkaitan antara karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap

kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk sumbangan pemikiran mengenai pentingnya kesadaran tentang bagaimana hasil dari pencapaian kinerja yang baik secara finansial maupun non finansial sebagai dampak bahwa adanya keterkaitan dari pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, untuk bisa memberikan gambaran mengenai skripsi yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar pengetahuan pelaksanaan penelitian, ringkasan penelitian sebelumnya yang berhubungan yang telah dilakukan, dan berbagai argumentasi yang menjadi hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan



sumber data, variable penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Diikuti dengan analisis dan pembahasan yang meliputi analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, Uji hipotesis, serta pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya



